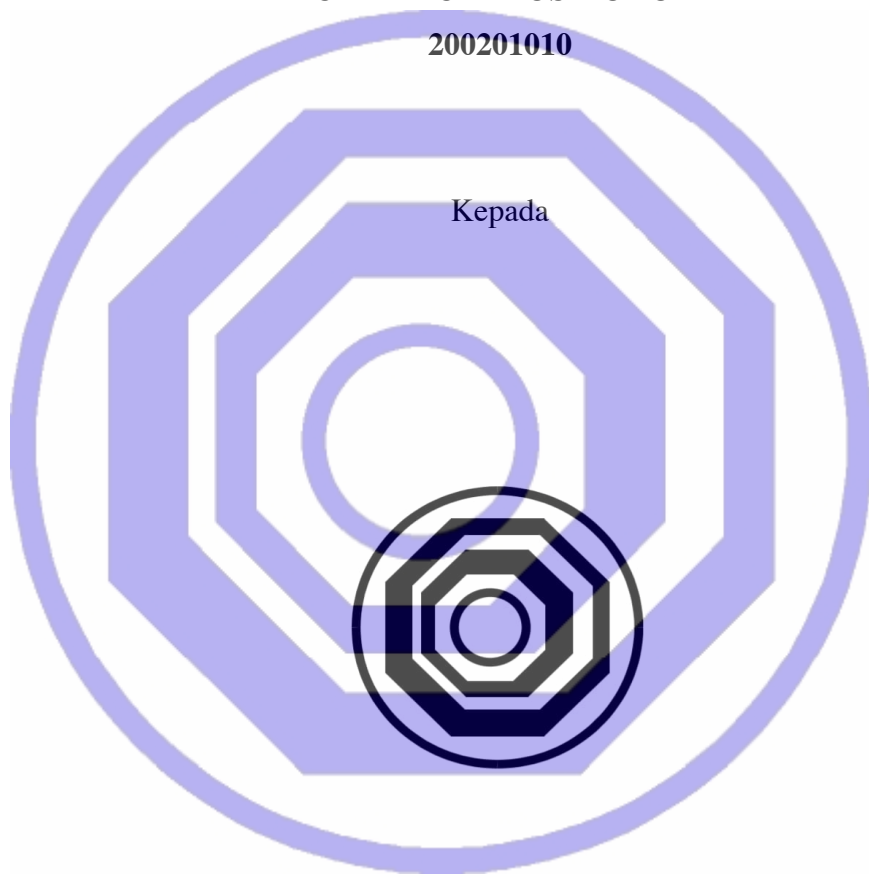


**KRITIK JÜRGEN HABERMAS ATAS MEDIA MASSA:
PRINSIP, DEBAT DAN RELEVANSI**

Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Magister
Program Studi Magister Filsafat

Diajukan oleh
MICHAEL CARLOS KODOATI
200201010



PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

Jakarta, Agustus 2022

TESIS

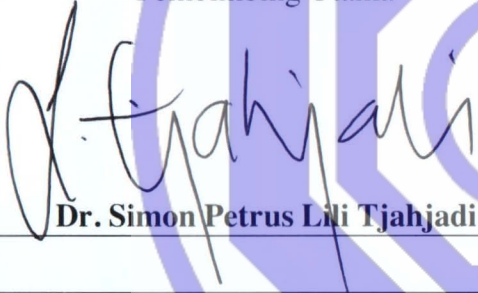
**KRITIK JÜRGEN HABERMAS ATAS MEDIA MASSA:
PRINSIP, DEBAT DAN RELEVANSI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

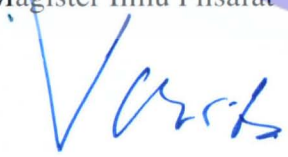
Michael Carlos Kodoati

NIM: 200201010

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 7 Juli 2022
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat.

PEMBIMBING	
Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
 Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi	 Prof. Dr. A. Sunarko

Disahkan pada tanggal 30 Agustus 2022

Ketua Program Studi Magister Ilmu Filsafat	Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
 Prof. Dr. J. Sudarminta	 Thomas Hidya Tjaya, Ph.D.

PERNYATAAN

Bukan saja karena keyakinan akademik bahwa plagiarisme merupakan kejahatan berat akademik, tetapi dalam lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, penulis ingin selalu memastikan bahwa keaslian penelitian, di dalamnya komitmen untuk menghindarkan diri dari plagiarisme itu benar-benar dipraktikkan dalam penyusunan karya ilmiah tesis di Program Studi Magister Filsafat ini. Olehnya apa pun dalam naskah tesis ini, penulis telah melalui diskusi dengan Dosen Pembimbing, berupaya melakukan tahapan-tahapan, mulai dari pemilihan tema yang orisinal, relevan dan memberikan pandangan baru dari pemikiran filsafat yang dikemukakan Jürgen Habermas.

Maka, dengan ini saya menyatakan bahwa **dalam tesis ini tidak terdapat teks**

1. Yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian karya tulis, di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan, atau
2. Yang sudah pernah dipublikasikan, atau
3. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu diberitahukan dalam catatan tertulis terhadap teks itu dan tulisan itu, apabila sudah dipublikasikan, disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Michael Carlos Kodoati

ABSTRAK

[A] Michael Carlos Kodoati (200201010)

[B] Kritik Jürgen Habermas Atas Media Massa: Prinsip, Debat dan Relevansi

[C] vi + 94 hlm; 2022

[D] Demokrasi, Deliberatif, Ekspansi Sistem, Hukum, Jürgen Habermas, *Lebenswelt*, Media Massa, Refeodalisasi, Regulasi, Ruang Publik, Diskursus, Teori Kritik, Tindakan Komunikatif

[E] Penelitian tesis ini hendak memperlihatkan kritik Jürgen Habermas terhadap media massa kontemporer yang didasarkannya pada konsep ruang publik, teori diskursus dan demokrasi deliberatif. Bagi Habermas, media massa dalam kerangka demokrasi pada hakikatnya berfungsi sebagai pemantik budaya kritik dalam diskursus di ruang-ruang publik sehingga masyarakat warga berdaulat untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bebas dan setara. Tetapi, media massa kontemporer menurut Habermas ditemukan berbeda dari hakikat itu. Perkembangan teknologi dan industri menyebabkan media massa semakin tidak memiliki karakter diskursif, karena kinerjanya bukan lagi suatu komunikasi dengan cara tatap muka spontan dan memunculkan timbal balik. Habermas menilai bahwa media massa kontemporer tidak bersifat independen. Indikasinya ialah media massa butuh modal serta relasi politik dan tidak dapat menghindar dari dominasi sistem kapitalisme dan kekuasaan politik. Bagi Habermas, media massa memerlukan regulasi diri jika ingin memperbaiki dirinya dan tetap disebut sebagai “media massa demokratis.” Regulasi diri ini diharapkan dapat mengikat cara-cara pengelolaan media massa dengan kode etik profesi dan aturan-aturan hukum. Regulasi diri perlu dibentuk secara diskursif berdasarkan jaminan konstitusional yang memastikan bahwa media massa merupakan hak dasar. Dengan itu, diharapkan suatu kebebasan pers, keragaman media massa dan kebebasan informasi, jaminan akses publik dan masyarakat warga ke ruang publik serta pencegahan terhadap monopoli arena komunikasi publik oleh kepentingan politik dan ekonomi, dapat diwujudkan. Dalam kerangka kehidupan kontemporer, tantangan mempraktikkan regulasi diri bagi media massa bukanlah upaya yang mudah untuk dilakukan dan perlu terus diperkokoh, salah satunya dengan mengupayakan kriteria diskursif yang praktis bagi praktik-praktik media massa kontemporer. Kritik Habermas memberikan cermin bagi media massa agar berupaya untuk kembali berfungsi sebagai pemantik budaya kritik masyarakat warga di ruang-ruang publik.

[F] 6 sumber utama + 45 sumber sekunder (1976 – 2022)

[G] Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tesis Yang Diajukan.....	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Kerangka Isi.....	9
BAB II KONTEKS: PARADIGMA PEMIKIRAN HABERMASIAN	11
2.1 Konsep Ruang Publik	11
2.1.1 Yunani-Romawi Kuno Hingga Keruntuhan Feodalisme.....	12
2.1.2 Menuju Ruang Publik Kritis	16
2.1.3 Budaya Debat Hingga Budaya Konsumeristik	19
2.1.4 Mengelola “Publisitas Kritis”	21
2.2 Teori Diskursus	25
2.2.1 Teori Kritis: Mazhab Frankfurt.....	26
2.2.2 Reorientasi Teori Kritis: Tindakan Komunikatif.....	28
2.2.3 Klaim-klaim Kesahihan dan <i>Lebenswelt</i> (Dunia Kehidupan)	29
2.2.4 <i>Lebenswelt</i> dan Sistem.....	31
2.2.5 Etika Diskursus	32
2.3 Demokrasi Deliberatif.....	36
2.3.1 Hukum Sebagai Jaminan Hak-hak Dasar	37
2.3.2 Regulasi Diri Dalam Tatanan Negara Hukum	39
2.4. Rangkuman	42

BAB III MENELISIK MEDIA MASSA.....	43
3.1 Beberapa Keprihatinan	43
3.2 Keperluan Akan Regulasi Diri.....	57
3.3 Rangkuman	63
BAB IV MENIMBANG HABERMAS	64
4.1 Inti Sari Kritik Habermas Terhadap Media Massa	64
4.2 Mengapresiasi Habermas	65
4.3 Beberapa Hal Untuk Didiskusikan	68
4.3.1 Urgensi Media Massa Bagi demokrasi	68
4.3.2 Ekspansi Sistem Terhadap Media Massa.....	70
4.3.3 Kriteria Diskursif Media Massa.....	75
4.3.4 Hidup Bersama Dengan Sistem: Upaya Regulasi Diri Media Massa...	79
BAB V PENUTUP	82
5.1 Penegasan Tesis dan Relevansi	82
5.2 Impuls Untuk Studi Lanjut	84
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang (1.1), perumusan masalah (1.2), tesis yang diajukan (1.3), dan metode penelitian (1.4) yang berisi literatur apa saja yang digunakan sebagai sumber pokok uraian penelitian. Bab diakhiri dengan kerangka isi (1.5).

1.2 Latar Belakang

Istilah “media” berasal dari kata Latin dalam bentuk tunggal “*medium*” dan dalam bentuk jamak “*medii*” yang secara etimologis berarti “perantara” atau “pengantar.” Istilah media lekat dengan komunikasi. Secara etimologis, kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, *communicare*, yang artinya “menyampaikan.” Komunikasi itu merupakan aktivitas menyampaikan dan media menjadi saluran, yang melaluinya pesan-pesan dari komunikator dapat tersampaikan kepada komunikan, dan sebaliknya. Penggunaan bahasa menjadi inti media dalam berkomunikasi. Suatu pesan dapat dikomunikasikan hanya dengan bahasa. Dalam konteks sistem kehidupan bersama masyarakat yang menganut demokrasi, komunikasi penting agar masyarakat dapat membentuk saling pengertian. Saling pengertian dapat terjadi jika seluruh elemen di dalam masyarakat menyalurkan pesannya satu sama lain. Keseluruhan elemen yang dimaksud mengartikan bahwa warga sebagai subjek tidak sendiri, tetapi bersama dengan subjek serupa dan setara lainnya, membentuk negara, membicarakan kehidupannya, berupaya merancang dan akhirnya meraih hidup baik secara bersama-sama. Komunikasi yang terjalin dalam model seperti itu disampaikan melalui media yang menyalurkan pesan dengan benar, merawat saling pengertian sesuai tujuan dan alasan-alasan para subjek ketika mereka membentuk negara.

Demokrasi dalam praktik bernegara berisi masyarakat kompleks, yang terdiri atas subjek-subjek dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Komunikasi satu subjek kepada yang lain melalui bahasa sebagai medianya, tentu lebih sederhana dibandingkan komunikasi antara subjek-subjek di dalam masyarakat yang kompleks. Jika saya berkomunikasi dengan orang lain, maka pesan yang ingin disampaikan dapat secara langsung saya katakan. Tetapi di dalam konteks masyarakat kompleks, cara berkomunikasi menjadi berbeda sebab ada banyak sekali pesan yang perlu disalurkan, dari beragam cara berpikir. Media perlu memiliki kemampuan untuk mengelola, agar pesan-pesan ini dapat dikomunikasikan dengan cara-cara yang tepat. Media semacam ini di dalam demokrasi

kontemporer dikenal sebagai media massa, yakni media yang mengelola komunikasi di antara banyak orang. Dalam arti itu, media massa lahir karena adanya kebutuhan komunikatif dalam publik demokratis.

Demokrasi sebagai “kedaulatan rakyat” bukan berarti bahwa tindakan memerintah dijalankan langsung oleh setiap warga. Warga berdaulat melalui perwakilan yang dipilihnya secara konstitusional. Perwakilan rakyat adalah kekuasaan memerintah berdasarkan kehendak rakyat. Supaya kekuasaan memerintah ini bekerja sesuai dengan kehendak rakyat, maka ia perlu dikontrol oleh warga itu sendiri. Mekanisme kontrol ini menciptakan dua pihak dalam hubungan komunikatif, yaitu warga dan pemerintah. Sedikit saja menyeleweng dari visi misi warga, maka pemerintah dapat ditegur oleh warga. Atas dasar kedaulatan rakyat, warga dapat menyampaikan kehendaknya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban merespon kehendak warga yang disampaikan itu. Begitulah secara timbal balik terjadi komunikasi antara warga dan pemerintah, dengan tujuan agar kehendak rakyat menjadi sentral dalam setiap tindakan memerintah para wakil rakyat. Perwakilan rakyat dalam tindakan memerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat tidak dapat dibiarkan untuk memerintah. Dalam demokrasi, warga dapat menyampaikan kehendaknya kepada pemerintah, sedangkan pemerintah menerima dan mengelola kehendak warga itu menjadi titik berangkat bagi tujuan pemerintahan yang dijalankannya.

Demokrasi lahir karena adanya keinginan manusia untuk bebas dari penindasan yang dilakukan pemerintahan yang semena-mena, yakni raja atau feodalisme yang memerintah berdasarkan kehendak dirinya sendiri bukan berdasarkan kehendak rakyat. Demokrasi menjadi konsekuensi dari manusia rasional. Manusia rasional menghendaki adanya komunikasi yang kritis untuk menentukan pengelolaan kehidupan bersama. Manusia rasional ini membicarakan kehidupan bersama suatu negara di ruang-ruang publik. Ruang publik adalah arena komunikasi kritis warga dengan pemerintah yang berkuasa. Komunikasi kritis disampaikan melalui tulisan-tulisan berisi kritik dan diskusi-diskusi dengan argumen-argumen bernalar yang memantik kesadaran bersama untuk menghilangkan penindasan yang dilakukan pemerintahan yang semena-mena. Setelah penindasan berhasil diatasi, ruang publik ini perlu terus dirawat sebagai arena komunikasi kritis yang selalu memastikan terus terpeliharanya kehidupan bersama yang demokratis. Merawat komunikasi kritis bertujuan mengokohkan demokrasi, di mana pengelolaan kehidupan bersama didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam mekanisme itulah, media massa bertumpu. Media massa menjadi presentasi ruang publik yang mengokohkan demokrasi, di mana pengelolaan kehidupan bersama didasarkan pada kedaulatan rakyat. Jadi akhirnya, media massa oleh karena

demokrasi, telah lahir sebagai presentasi ruang publik. Fungsi media massa adalah menjadi presentasi ruang publik yang mengokohkan demokrasi, di mana pengelolaan kehidupan bersama didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam arti itu, media massa merawat komunikasi kritis di dalam ruang-ruang publik dan memastikan suatu kehidupan bersama masyarakat warga tidak dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan memerintah yang menindas.

Keinginan masyarakat warga untuk bebas diekspresikan secara kritis dan telah melahirkan demokrasi, sehingga alasan-alasan mengapa demokrasi itu ada, seperti kehendak yang bebas untuk berekspresi perlu menjadi hak dasar yang dijamin dalam konstitusi suatu negara yang demokratis. Pada pengandaian manusia rasional tertindas yang berupaya menggapai kebebasan tadi, kehendaknya untuk bebas diekspresikan secara kritis di ruang-ruang publik. Dalam arti ini, media massa demokratis, memiliki kebebasan untuk merawat dimensi kritis dalam komunikasi-komunikasi publik. Kebebasan untuk merawat dimensi kritis dalam komunikasi-komunikasi publik ini dapat diterjemahkan sebagai suatu hak berekspresi. Dalam arti itu pula, media massa merupakan hak berekspresi. Oleh sebab itu, hak media massa untuk berekspresi perlu menjadi hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Jadi pada akhirnya media massa dijamin oleh konstitusi sebagai hak dasar.

Namun, dunia di mana demokrasi ini hidup bukanlah dunia tanpa masalah. Dunia di mana media massa beroperasi saat ini telah berhasil membangun struktur-struktur sistem karena perkembangan teknologi dan industrialisasi yang pesat. Media massa, bersama dengan apa pun yang hidup di dunia kontemporer berelasi dengan struktur-struktur sistem itu. Manusia bebas yang rasional pada akhirnya hidup di tengah dunia dalam dominasi sistem. Media massa sebagai presentasi ruang publik pada akhirnya juga hidup bergantung pada dominasi sistem. Penindasan oleh feodalisme pada masyarakat warga yang kemudian melahirkan demokrasi akhirnya kembali menjelma menjadi dominasi sistem di era demokrasi kontemporer. Jürgen Habermas, filsuf kontemporer Jerman, melihat terjadinya refeodalisasi pada ruang publik dalam dunia kontemporer. Habermas melihat bahwa ruang publik telah direfeodalisasi akibat dominasi sistem¹ pada media massa kontemporer. Habermas kemudian melayangkan kritiknya terhadap media massa kontemporer.

Kritik Habermas ini didasarkan pada tiga paradigma pemikirannya mengenai ruang publik, teori diskursus dan demokrasi deliberatif. Berdasarkan pada tiga paradigma tersebut, Habermas melihat bahwa bentuk komunikasi pada media massa kontemporer tidak sesuai

¹ Pada keseluruhan penulisan tesis ini, yang penulis maksudkan dengan sistem yang memengaruhi dan mendominasi media massa ialah sistem kapitalisme dan sistem kekuasaan politik.

dengan gambaran komunikasi tatap muka yang spontan dan timbal balik, hal itu karena media massa hanya seolah-olah memberikan model deliberatif. Pada media massa, struktur dan dinamika kekuatan komunikasi politik membantu pembentukan pendapat publik, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai presentasi ruang publik yang semestinya mempromosikan proses legitimasi deliberatif di ruang publik masyarakat yang kompleks. Untuk itu menurut Habermas, diperlukan dua syarat jika media massa ingin tetap dianggap sebagai presentasi ruang publik, yaitu (1) memiliki sistem regulasi diri agar tercipta sistem media massa yang independen dari lingkungan sosialnya dan, (2) khalayak media massa yaitu pembaca, pendengar dan pemirsa, menghasilkan hubungan umpan balik antara diskursus pihak elit yang terinformasi dan masyarakat warga yang responsif.²

Habermas mengkritik media massa, namun pada akhirnya menawarkan solusi bahwa kelemahan media massa dapat diatasi jika ada suatu regulasi diri yang dijamin secara konstitusional. Kritik Habermas terhadap media massa sebenarnya dapat dilihat sebagai pengingat, bahwa media massa memiliki potensi menjadi sarana komunikasi publik yang demokratis, juga pengingat bahwa ia merupakan infrastruktur ekspresi publik yang dijamin sebagai hak dasar dalam konstitusi negara. Itu berarti bahwa media massa perlu beroperasi seluas-luasnya dalam koridor hukum yang juga menjamin seluas-luasnya kebebasan berekspresi warga. Jaminan seluas-luasnya itu tentu bermaksud agar media massa beroperasi sebagai saluran untuk kepentingan demokrasi itu sendiri.

Motif utama penelitian tesis ini ingin menganalisis secara keseluruhan inti kritik Habermas terhadap media massa. Motif ini menjadi sebuah urgensi bagi penulis dan juga dunia media massa sekarang ini. Sebagai jurnalis, penulis memandang bahwa kritik Habermas sangat keras namun relevan dengan dinamika media massa hari ini. Kritik Habermas pada akhirnya memunculkan optimisme. Jurnalisme yang ideal akan merasa terkoyak karena kritik Habermas, tetapi merenungkan makna dibalik kritik Habermas dapat membangkitkan optimisme bagi terwujudnya praktik-praktik media massa yang benar di masa yang akan datang. Hari ini, mudah bagi kita untuk menjumpai media massa yang tidak independen dan bukan lagi menjadi saluran ruang publik demokratis. Jika masalah independensi yang dilayangkan Habermas adalah media massa dikuasai kapitalisme dan menjadi alat kekuasaan politik, Indonesia hari ini memiliki contoh yang sangat relevan.

Penguasaan media massa oleh pihak pemodal di Indonesia tidak dapat dihindari dan terjadi pada sebuah media massa yang hampir bangkrut dan terlilit utang karena tingginya

² Jürgen Habermas, "Political Communication in Media Society: Does Democracy still have an Epistemic Dimension?," in *Europe: The Faltering Project* (Cambridge, UK: Polity Press, 2009), 139.

biaya produksi program. Contohnya, Lativi milik Abdul Latief terlilit utang dan dibayarkan oleh PT. Visi Media Asia milik Grup Bakrie, sedangkan TV 7 milik bersama Kompas Gramedia dan Para Grup (sekarang CT Corp) juga mengalami kesukaran beroperasi karena biaya produksi program.³ Awal tahun 2007, dengan total suntikan dana Rp 1,3 triliun, Lativi dikelola dengan manajemen baru dan berganti nama menjadi TV One, sementara TV 7 menjadi Trans 7.⁴ Suntikan dana korporasi kepada TV One dan Trans 7 membuat keduanya eksis.⁵ Media massa memang membutuhkan modal untuk biaya produksi program. Tetapi faktanya bukan sekedar itu, media massa malah telah jatuh ke dalam sistem kapitalisme dan diperalat sebagai pundi-pundi penghasil laba bagi korporasi. Bisnis Trans 7, salah satu stasiun televisi yang menerima suntikan dana dan dikelola manajemen baru tadi sangat menjanjikan (hampir 40 persen pendapatan Para Grup (sekarang CT Corp) dihasilkan Trans 7).⁶ Pengelolaan media massa tidak lagi sekedar kebutuhan untuk memenuhi biaya produksinya, melainkan telah berubah menjadi usaha yang mendatangkan laba. Biaya produksi yang lebih kecil dari laba memperlihatkan pengelolaan media massa oleh pemodal tidak lagi soal memenuhi biaya produksi tetapi telah berubah menjadi sarana meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Contohnya, stasiun televisi SCTV milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mencatat pendapatan sebanyak Rp 5,93 triliun dengan jumlah laba bersih Rp 1,35 triliun.⁷ Hary Tanoesoedibjo yang memiliki PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), induk dari RCTI, Global TV, MNC TV dan I News membukukan kenaikan laba bersih sebanyak Rp 2,38 triliun pada tahun 2021.⁸

Selanjutnya, soal media massa menjadi alat kekuasaan politik. Di Indonesia, sebagian besar korporasi pemilik stasiun televisi merupakan politisi dan media massa miliknya digunakan sebagai alat mempromosikan gagasan politis mereka. Contohnya, Metro TV (Surya Paloh, Partai Nasdem), TV One, ANTV, Viva News (Aburizal Bakrie, Partai Golkar), MNC TV, RCTI, Global TV, Sindonews, I News, Koran Sindo (dan media massa lain di bawah naungan MNC Grup dimiliki Hary Tanoesoedibjo, Partai Perindo, sebelumnya

³ Machyudin Agung Harahap, *Kapitalisme Media: Ekonomi Politik Berita dan Diskursus Televisi* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013), 2.

⁴ Harahap, *Kapitalisme Media*, 2.

⁵ Harahap, *Kapitalisme Media*, 2.

⁶ Harahap, *Kapitalisme Media*, 2.

⁷ "Bedah Kinerja Saham Emiten TV Tahun Ini, Siapa Juaranya?," CNBC Indonesia, updated 16.57 WIB, 2022, accessed 31 Mei, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220414161143-17-331807/bedah-kinerja-saham-emiten-tv-tahun-ini-siapa-juaranya>.

⁸ "Bedah Kinerja Saham Emiten TV Tahun Ini, Siapa Juaranya?."

Partai Nasdem dan Partai Hanura).⁹ Media massa tersebut kerap memunculkan wajah pemiliknya di berbagai produksi pemberitaan dan memberikan porsi tayangan mengenai pemiliknya atau partai pemiliknya menjelang Pemilu 2014.¹⁰ Pada saat Pemilu 2014, media massa milik para politisi pemodal menayangkan narasi kemenangan yang berbeda, misalnya TV One mendeklarasikan kemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, di lain pihak Metro TV menayangkan deklarasi kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. TV One dimiliki Aburizal Bakrie yang pro Prabowo-Rajasa, sementara Metro TV dimiliki Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang merupakan salah satu pendukung utama Joko-Kalla.¹¹ Pola semacam itu bertahan hingga Pemilu terbaru pada tahun 2019.

Bagi media massa, perkembangan teknologi dan kecanggihan ilmu komunikasi tidak semakin menghasilkan umpan balik yang diskursif. Kecanggihan satelit dewasa ini, semestinya bagi media massa memampukannya untuk dapat mendorong produksi program yang menjangkau semakin banyak orang untuk berdiskursus. Habermas melihat bahwa semua kecanggihan teknologi itu malah tidak membantu terbangunnya diskursus. Mekanisme kapitalisme telah mengubah perilaku media massa dari presentasi ruang publik, menjadi organ kapitalisme yang memproduksi program, demi menjual ruang iklan yang hasilnya tidak sekedar digunakan sebagai biaya operasional, tetapi juga sekaligus menjadi ekosistem penghasil keuntungan bagi kapitalisme. Dalam perusahaan yang berorientasi pada keuntungan finansial yang besar, media massa cenderung menciptakan program untuk sekedar menghibur penonton dan olehnya menarik lebih banyak pengiklan. Media massa akhirnya melupakan tugas demokratisnya sebagai presentasi ruang publik untuk diskursus publik. Media massa yang menghasilkan keuntungan yang besar dari iklan, malah memperkaya pemiliknya, sementara upaya dirinya mengalokasikan biaya lebih untuk membayar penyediaan teknologi dan sumber daya yang dapat mendorongnya menjadi saluran diskursus publik, malah sangat minim. Hari ini mudah untuk menemukan media massa berbasis televisi yang mengaku diri penyiaran publik, tetapi kekurangan konten yang mengandung kebutuhan substantif publik. Tayangan televisi lebih didominasi tayangan sinetron, dengan muatan iklan yang berlimpah dan tayang dalam durasi berjam-jam pada jam tayang utama, sementara tayangan mengandung informasi dan diskursus publik hanya berdurasi singkat, itu pun berisi informasi mengenai pencitraan tokoh politik, bukan

⁹ Abdul Wahid dan Dhinar Aji Pratomo, *Masyarakat dan Teks Media: Membangun Nalar Kritis Masyarakat pada Teks Media* (Malang: UB Press, 2017), 10.

¹⁰ Pratomo, *Masyarakat*, 10.

¹¹ Pratomo, *Masyarakat*, 10.

tayangan diskusi yang membicarakan persoalan publik, bahkan tayang di tengah malam ketika publik sudah tidur. Misalnya, stasiun RCTI, menayangkan 80 persen program hiburan berupa sinetron, 8 persen tayangan interaktif (bukan dialog isu tetapi kuis interaktif), dan 12 persen tayangan berita. Salah satu tayangan berita yaitu Liputan 6 di stasiun televisi SCTV dalam satu tahun berhasil mengumpulkan laba Rp 120 miliar, atau Rp 1 miliar per bulan,¹² angka itu jauh di bawah laba yang dihasilkan sebuah judul sinetron yang tayang setiap hari pada jam tayang utama di stasiun televisi RCTI sejumlah Rp 2,1 triliun hanya dalam 178 hari.¹³

Argumen Habermas dalam kritiknya terhadap media massa sangat kuat. Bahwa realitas komunikasi massa dalam masyarakat media kontemporer, menunjukkan kinerja media massa sebagai presentasi yang tidak cocok bagi ruang publik. Tetapi, tuntutan Habermas agar media massa dapat mengatur dirinya, sehingga menjadi independen dan berkualitas diskursif, menurut penulis dapat mendorong optimisme dan dapat terus dipromosikan. Optimisme untuk mempromosikan independensi media massa berdasarkan kritik Habermas, dapat memperkuat keyakinan penulis sebagai jurnalis dan juga profesional media massa lainnya, bahwa media massa dengan jurnalismenya masih meyakini sebuah ide bahwa dalam demokrasi, kebenaran dapat ditegakkan tanpa pengaruh uang dan suasana ketidakbebasan.¹⁴

Media massa dikandung dan dilahirkan berdasarkan karakter kebebasan pada demokrasi. Habermas mempromosikan demokrasi deliberatif sebagai radikalisme demokrasi, upaya mempertajam makna kehidupan demokratis, menyediakan suatu kerangka prosedur, yang diharapkan memurnikan cita-cita awal demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Kritik Habermas terhadap media massa sebenarnya berada dalam konteks radikalisme demokrasi itu. Ketika media massa beroperasi dalam tindakan-tindakan yang tidak lagi mengutamakan kepentingan publik, maka proseduralisme menunjukkan cara bagi media massa agar kembali sesuai dengan harapan demokrasi. Sebenarnya proseduralisme Habermas sedang mengingatkan media massa akan perannya yang sangat signifikan pada masa lahirnya demokrasi. Demokrasi deliberatif mengandung tata kelola cara-cara hidup bernegara berdasarkan hukum, yang dapat menjadi arahan, cambuk, atau suatu pengingat bagi cara beroperasi media massa dewasa ini.

¹² "Kuartal I 2021, Pendapatan Pengelola SCTV Naik Ditopang Pemasukan Iklan," Tempo, updated 19.01 WIB, 2022, accessed 31 Mei, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1459206/kuartal-i-2021-pendapatan-pengelola-sctv-naik-ditopang-pemasukan-iklan>.

¹³ @bigalphaid, "Total Pendapatan Sinetron Ikatan Cinta," (Instagram, 26 Februari 2021).

¹⁴ Sandra L. Borden, *Journalism as Practice: MacIntyre, Virtue Ethics and the Press* (2013), 32.

1.2 Perumusan Masalah

Uraian Habermas mengenai komunikasi politik, yang di dalamnya memuat kritiknya terhadap media massa dimulai dengan pertanyaan pemicu: Apakah demokrasi masih berada dalam posisinya yang epistemik dengan kondisi komunikasi politik dalam masyarakat media saat ini?¹⁵ Keseluruhan uraian itu menyimpulkan bahwa Habermas mendapati komunikasi massa dengan media-medianya dalam kehidupan demokrasi kontemporer telah mengandung kompleksitas yang cenderung negatif dan mengancam posisi epistemik demokrasi. Konsep komunikasi politik Habermas menyimpulkan bahwa demokrasi terancam jika mutu komunikasi publik rusak. Habermas menempatkan media massa sebagai penyumbang utama kerusakan itu. Kritik Habermas terhadap media massa seluruhnya berangkat dari tiga tema besar pemikirannya yakni konsep ruang publik, teori diskursus dan demokrasi deliberatif yang melahirkan proseduralisme. Sebenarnya proseduralisme Habermas sedang mengingatkan media massa akan perannya yang sangat signifikan pada masa lahirnya demokrasi. Demokrasi deliberatif mengandung tata kelola cara-cara hidup bernegara berdasarkan hukum, yang dapat menjadi arahan, cambuk, atau suatu pengingat bagi cara beroperasi media massa dewasa ini.

Kritik Habermas bahwa media massa tidak independen dan tidak berkualitas diskursif memunculkan pertanyaan-pertanyaan utama sebagai masalah yang ingin diteliti oleh penulis: Apakah kritik Habermas terhadap media massa dan apa yang mendasarinya? Media massa kontemporer semacam apa yang dapat mewujudkan tuntutan kritik Habermas? Seperti apa posisi media massa jika ia harus menjadi presentasi ruang publik?

1.3 Tesis Yang Diajukan

Bagi Jürgen Habermas, demokrasi melahirkan media massa sebagai presentasi ruang publik, namun media massa berada dalam cengkeraman kuasa politik dan modal sehingga dianggap tidak dapat mengemban tugas itu. Media massa demokratis mungkin dapat menjadi presentasi ruang publik yang memadai itu jika mengupayakan regulasi diri sebagaimana ia dijamin secara konstitusional sebagai hak dasar. Dengan upaya normatif itu media massa terarah pada independensi dan kualitasnya yang diskursif. Tetapi upaya normatif Habermas itu perlu diupayakan dengan menentukan kriteria diskursif yang praktis bagi praktik-praktik media massa dalam kerangka kontemporer.

¹⁵ Habermas, "Political in Europe."

1.4 Metode Penelitian

Uraian tesis ini menggunakan metode penelitian literatur. Sebagaimana telah disampaikan di bagian perumusan masalah bahwa tiga tema besar pemikiran Habermas telah mendasari kritiknya terhadap media massa, yaitu ruang publik, teori diskursus, dan demokrasi deliberatif. Penulis menggunakan enam sumber utama untuk penelitian pemikiran Habermas seputar tiga tema besar tersebut, yaitu buku Habermas yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1991), lalu buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia yaitu *12 Tokoh Etika Abad ke-20* (Magnis-Suseno, 2000) khusus pada bagian Etika Diskursus Habermas dan *Demokrasi Deliberatif* (Budi Hardiman, 2009). Buku Habermas *Between Facts and Norms* (1996) digunakan untuk mengonfirmasi argumen-argumen Habermas dalam buku Hardiman. Sumber utama yang juga digunakan penulis untuk mengamati fokus kritik Habermas terhadap media massa ialah *Europe: The Faltering Project* (2008), di mana di dalamnya terdapat dua bab penting yang menunjukkan fokus kritik Habermas terhadap media massa, yaitu bab 8 berjudul *Media, Markets and Consumers* dan bab 9 berjudul *Political Communication in Media Society*. Sehingga, ada enam sumber utama yang digunakan.

1.5 Kerangka Isi

Uraian penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut. Bab I pendahuluan, berisi latar belakang (1.1), perumusan masalah (1.2), tesis yang diajukan (1.3), dan metode penelitian (1.4) yang berisi sumber literatur digunakan dalam penelitian ini. Bab diakhiri dengan kerangka isi (1.5).

Selanjutnya, bab II menguraikan pemikiran Habermas tentang ruang publik, teori diskursus dan demokrasi deliberatif. Inilah paradigma pemikiran yang mendasari kritik Habermas terhadap media massa. Bab ini diberi judul konteks paradigma pemikiran Habermas. Bagian pertama bab ini berisi konsep ruang publik (2.1). Bagian itu terbagi atas uraian tentang ruang publik Yunani-Romawi Kuno hingga keruntuhan feodalisme (2.1.1), menuju ruang publik kritis (2.1.2), budaya debat menuju budaya konsumeristik (2.1.3), ditutup dengan mengelola publisitas kritis (2.1.4). Bagian kedua menguraikan teori diskursus (2.2). Bagian ini, terdiri dari teori kritis Mazhab Frankfurt (2.2.1), reorientasi teori kritis: tindakan komunikatif (2.2.2), klaim-klaim kesahihan dan *lebenswelt* (dunia kehidupan) (2.2.3) dan etika diskursus (2.2.5). Bagian ketiga tentang konsep demokrasi

deliberatif (2.3), yang berisi hukum sebagai jaminan hak-hak dasar (2.3.1) dan regulasi diri dalam tatanan negara hukum (2.3.2). Bagian keempat ialah rangkuman (2.4).

Setelah uraian tentang konteks paradigma pemikiran Habermasian, pada bab III, penulis akan menelisik media massa dari sudut pandang pemikiran Habermas. Bab ini diberi judul menelisik media massa dan berisi uraian mengenai beberapa keprihatinan Habermas (3.1) dan keperluan akan regulasi diri (3.2). Bab ini ditutup dengan rangkuman (3.3).

Bab IV dikhususkan untuk menimbang pemikiran Habermas. Ada bagian inti sari kritik Habermas terhadap media massa (4.1), dilanjutkan dengan mengapresiasi sumbangan Habermas (4.2). Uraian dilanjutkan dengan beberapa hal yang perlu untuk didiskusikan (4.3) yakni urgensi media massa sebagai demokrasi (4.3.1), ekspansi sistem dan kematian saluran budaya kritik (4.3.2), kriteria diskursif media massa (4.3.3) dan terakhir hidup bersama dengan sistem sebagai upaya regulasi diri media massa (4.3.4).

Bab V adalah penutup yang menguraikan relevansi (5.1), di dalamnya akan diawali dengan penegasan kembali mengenai tesis yang diajukan, lalu dilanjutkan dengan impuls untuk studi lanjut (5.2) sebagai bagian terakhir dari uraian penelitian tesis ini.

Uraian penelitian tesis ini pada akhirnya adalah daftar pustaka, sumber-sumber pustaka yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/ Jurnal

A. Utama

Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated by William Rehg. Cambridge, USA: The MIT Press, 1996a.

— — —. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated by Thomas Burger & Frederick Lawrance. Cambridge, USA: The MIT Press, 1989.

— — —. "Media, Markets and Consumers: The Quality Press as the Backbone of the Political Public Sphere." In *Europe: The Faltering Project*. Cambridge: Polity Press, 2009.

— — —. "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Have an Epistemic Dimension?" Translated by Ciaran Cronin. In *Europe: The Faltering Project*, 138-83. Cambridge, UK: Polity Press, 2009.

Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' Dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Magnis-Suseno, Franz. *12 Tokoh Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

B. Sekunder

Bertens, Kees. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1976.

Borden, Sandra L. *Journalism as Practice: Macintyre, Virtue Ethics and the Press*. 2013.

Christians, Clifford G., John P. Ferré, and P. Mark Fackler. "Good News: Social Ethics and the Press." 1993.

- Devenney, Marx. *Ethics and Politics in Contemporary Theory*. London: Routledge, 2005.
- Ferree, Myra Marx, William Anthony Gamson, Jürgen Gerhards, and Dieter Rucht. *Shaping Abortion Discourse: Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002.
- Goode, Luke. *Jürgen Habermas: Democracy and the Public Sphere*. London; Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2005.
- Habermas, Jürgen. "Further Reflections on the Public Sphere." In *Habermas and the Public Sphere*, edited by Craig Calhoun, 421-61. Cambridge, USA: The MIT Press, 1992.
- . *The Philosophical Discourse of Modernity*. Cambridge, USA: MIT Press, 1987a.
- . *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Translated by Thomas Burger & Frederick Lawrance. Cambridge, USA: The MIT Press, 1989.
- . *The Theory of Communication Action. Reason and the Rationalization of Society*. 2 vols. Vol. 1, Boston, USA: Beacon Press, 1984.
- . *The Theory of Communication Action. Lifeworld and System, a Critique of Functionalist Reason*. 2 vols. Vol. 2, Boston, USA: Beacon Press, 1987.
- Harahap, Machyudin Agung. *Kapitalisme Media: Ekonomi Politik Berita Dan Diskursus Televisi*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik Dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, Dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Heychael, Muhamad. *Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik*. Yayasan Tifa dan Remotivi (Jakarta: 2014).
- Iggers, Jeremy. "Good News, Bad News. Journalism Ethics and the Public Interest.". Boulder: Westview Press, 1999.
- Koch, Gertrund. "Mass Culture and Cultural Criticism." In *The Habermas Handbook*. New York: Columbia University Press, 2009.
- Livingston, Sonia , and Peter Lunt. *Talk on Television: Audience Participation and Public Debate*. London: Routledge, 1994.
- Magnis-Suseno, Franz. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- McNair, Brian. *An Introduction to Political Communication (Sixth Edition)*. London dan New York: Routledge, 2018.
- McKee, Alan. *The Public Sphere: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Mele, Alfred. *Irrationality: An Essay on Akrasia, Self-Deception, and Self-Control*. United Kingdom: Oxford University Press, 1987.
- Menoh, Gusti A. B. *Agama Dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Nugroho, Alois A. "Mengapa Komunikasi Politik Perlu Etika?". In *Etika Komunikasi Politik*, edited by Alois A. Nugroho. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2011.
- Pembayun, Jaduk Gilang. "Rekonstruksi Pemikiran Habermas Di Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 1, 1 (1 Oktober 2017): 1-14.

- Peters, Bernhard. "Public Discourse, Identity and the Problem of Democratic Legitimacy." In *Public Deliberation and Public Culture: The Writings of Bernhard Peters, 1993–2005*, edited by Hartmut Wessler, 213–54. London, UK: Palgrave Macmillan, 2008c.
- Pratomo, Abdul Wahid dan Dhinar Aji. *Masyarakat Dan Teks Media: Membangun Nalar Kritis Masyarakat Pada Teks Media*. Malang: UB Press, 2017.
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Sudarminta, J. "Kritik Marcuse Terhadap Masyarakat Industri Modern." Chap. VIII In *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*, edited by M. Sastrapratedja, 121-74. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Tjahjadi, Lili. SP. "Kepublikan dalam Filsafat Kant." Chap. II, No. 3 In *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*, edited by F. Budi Hardiman, 79-104. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Wessler, Hartmut. *Habermas and the Media*. Cambridge, UK & Medford, USA: Polity Press, 2018.
- West, David. *Continental Philosophy: An Introduction*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1996.

Sumber Digital

A. Buku/ Jurnal

- Ettema, James S. "Journalism as Reason-Giving: Deliberative Democracy, Institutional Accountability, and the News Media's Mission." *Political Communication* 24, no. 2 (2007/05/21 2007): 143-60. <https://doi.org/10.1080/10584600701312860>.

Habermas, Jürgen. "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research." *Communication Theory* 16, no. 4 (2006): 411-26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x>.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x>.

Lubenow, Jorge Adriano. "Public Sphere and Mass Media in Jürgen Habermas." *Problemata* 03, no. 02 (2012): 228-74.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7443/problemata.v3i2.15110>.

Merrill, John, Peter Gade, and Frederick Blevens. *Twilight of Press Freedom: The Rise of People's Journalism*. Mahwah, N.J.: Erlbaum, L, 2001.
<http://site.ebrary.com/id/10258360>.

Polan, Dana. "The Public's Fear, or Media as Monster in Habermas, Negt, and Kluge. Jürgen Habermas's the Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society." Review of The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Jürgen Habermas. *Social Text*, no. 25/26 (1990): 260-66. <https://doi.org/10.2307/466251>.
<http://www.jstor.org/stable/466251>.

Young, Martin, and Francis Markham. "Coercive Commodities and the Political Economy of Involuntary Consumption: The Case of the Gambling Industries." *Environment and Planning A: Economy and Space* 49, no. 12 (2017): 2762-79.
<https://doi.org/10.1177/0308518x17734546>.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308518X17734546>.

B. Berita

"Konten Youtube Dan Sensor Dalam UU Penyiaran." Hukum Online, 2021, accessed 01.56 WIB, 7 Juni 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konten-i-youtube-i-dan-sensor-dalam-uu-penyiaran-lt6098e176d0acc>.

"Rupert Murdoch - US Media Dig Deep for Politicians: Political Donations by US Media Companies." The Guardian, 2003, accessed 07.03 WIB, 5 Juni 2022, <https://www.theguardian.com/media/2003/apr/07/Iraqandthemediarupertmurdoch>.

"Mengenal Organisasi Wartawan Di Amerika." Kompas, 2008, accessed 2 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2008/11/17/03012177/~Internasional~Feature?page=all..>

"Bedah Kinerja Saham Emiten TV Tahun Ini, Siapa Juaranya?" CNBC Indonesia, 2022, accessed 31 Mei, 2022, 16.57 WIB, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220414161143-17-331807/bedah-kinerja-saham-emiten-tv-tahun-ini-siapa-juaranya>.

"Kuartal I 2021, Pendapatan Pengelola SCTV Naik Ditopang Pemasukan Iklan." Tempo, 2022, accessed 31 Mei, 2022, 19.01 WIB, <https://bisnis.tempo.co/read/1459206/kuartal-i-2021-pendapatan-pengelola-sctv-naik-ditopang-pemasukan-iklan>.

C. Media Sosial

@bigalphaid. "Total Pendapatan Sinetron Ikatan Cinta." Instagram, 26 Februari 2021.